RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Jl. Gatot Subroto Km 7 No. 255 Telp. (061) 8461436 MEDAN

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan siklus perencanaan dan anggaran bahwa setiap tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja). Proses penyusunan Renja diawali dengan penjaringan isu / masukan eksternal dan internal, yang ditengarai secara langsung mepengaruhi pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*), melalui serangkaian proses mulai dari *musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten / kota dan sampai pada musrenbang provinsi.* Sehingga diharapkan esensi dan operasionalisasi program maupun kegiatan yang dicakup di dalam Renja dapat bersinergi dengan harapan dan keinginan *stakeholders*

Proses penyusunan Rancangan Renja Tahun 2019 ini mengacu dan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Renja tahun 2019 ini merupakan Renja tahun pertama dari Renstra 2018-2023. Kami menyadari bahwa Rancangan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran-saran untuk kesempurnaan dokumen ini.

Medan, Juli 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. Dahlet, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610323 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1.Latar Belakang I-1
1.2.Landasan Hukum I-8
1.3.Maksud dan Tujuan I-9
1.4.Sistematika Penulisan I-10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU II-1

2.1. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara II-1
2.2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara II-8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD II-22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah III-1
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III-10
3.3.Program dan Kegiatan III-22

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses Penyusunan Renja OPD

Penyusunan Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahapan pelaksanaan penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1) persiapan penyusunan;
2) penyusunan rancangan awal;
3) penyusunan rancangan;
4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5) perumusan rancangan akhir; dan
6) Penetapan.

Tahapan persiapan penyusunan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja,

orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Identifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaah terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Lain

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra tahun 2018-2023, sesuai dengan masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih. Oleh karenanya Renja Tahun 2019 ini menjadi sangat penting dalam pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun ke depan.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahun, dan Rencana Strategi Perangkat Daerah 5 tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra OPD dan mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2019. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

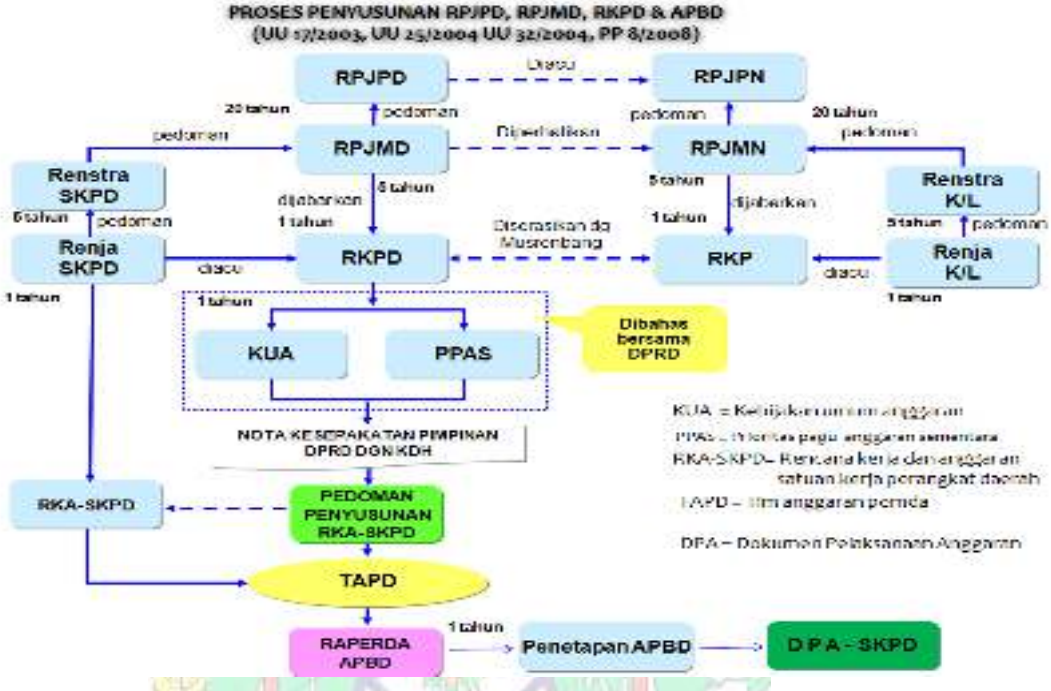

Gambar 1. Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar 1. diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: Renja OPD disusun dengan mempedomani Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan kemudian dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini harus mensinkronkan kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

RenjaDinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Nomor … Tahun ….

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari rangkaian rencana strategi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara, oleh karena itu tahun 2019 merupakan awal yang sangat menentukan dari satu periode perencanaan 5 tahunan (periode kepemimpinan kepala daerah) apakah sasaran pembangunan yang ditargetkan dapat dicapai atau tidak. Rencana Kegiatan 2019 ini juga diharuskan dapat menjawab persoalan-persoalan / target - target pembangunan daerah yang akan dicapai sehingga pada akhir dari masa kepemimpinan lima tahun kepala daerah sasaran/ target pembangunan daerah dapat dicapai. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dan juga untuk menjaga konsistensi program pembangunan peternakan, maka disusunlah Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara. Dokumen perencanaan ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja OPD mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodir pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam RPJMD dan Renstra.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya Sarana dan Prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walapun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi Sumatera Utara pada saat ini direfleksikan oleh fakta yang menunjukkan bahwa; (1) masih rendahnya pencapaian pembangunan manusia (dengan rendahnya pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia sebagai indikatornya); (2) tingginya tingkat kemiskinan; dan (3) tingginya jumlah pengangguran.

Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Sumatera Utara merupakan rumah tangga pertanian yang sangat berkaitan dengan komponen-komponen permasalahan yang dominan. Proporsi rumah tangga pertanian yang cukup signifikan tersebut, maka diyakini bahwa dengan akselerasi pembangunan di sektor pertanian berpotensi dapat memperkuat fundamental ekonomi Sumatera Utara melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian, penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional.

Besaran potensi kontribusi dari sektor pertanian di Sumatera Utara terhadap pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kontribusi sub sektor peternakan yang mendukung ketahanan pangan di dalam struktur perekonomian. Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan terhadap pertanian dan regional ternyata menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat antar waktu, dibandingkan dengan sub sektor lainnya di rumpun pertanian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi pembentukan PDRB sub sektor peternakan terhadap total PDRB pertanian. Meskipun secara relatif pangsa output sektor peternakan terbilang masih cukup rendah, namun laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sub sektor lainnya di dalam sektor pertanian Sumatera Utara. Kecenderungan laju pertumbuhan yang selalu meningkat merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa sektor peternakan dapat berperan sebagai komponen pengungkit (*leverage*) yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara.

Tingginya laju pertumbuhan PDRB peternakan, antara lain ditunjang oleh peluang dan potensi pengembangan sub sektor peternakan yang masih luas. Namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor ini yaitu sampai saat ini usaha sektor peternakan belum mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk peternakan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara sendiri, maupun dalam mensejahterakan para pelakunya. Adapun beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara antara lain :

1. Dampak perubahan iklim global; ketidak seimbangan produksi dan stok pangan antar kawasan.
2. Penyediaan pangan beragam berdasarkan potensi sumber daya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi
3. Penyediaan cadangan pangan beras yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga
4. Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan pangan strategis sepanjang tahun dan terutama pada HBKN
5. Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah (kab./kota)
6. Peningkatan pengawasan dan pengembangan penanganan keamanan pangan olahan dan buah dan sayuran segar
7. Peningkatan pola pangan harapan, melalui gerakan diversifikasi pangan yang berbasis pangan lokal
8. Sub sektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil dengan skala usaha terbatas dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian.
9. Terbatasnya bibit serta rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan.
10. Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan peternakan dari lembaga keuangan.
11. Tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai.
12. Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien.
13. Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk peternakan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha peternakan (peternak dan swasta), serta dapat dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi masyarakat Sumatera Utara, maka dirasakan masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha peternakan.

Adapun dari hasil identifikasi permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan peternakan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah serta kewenangan provinsi Sumatera Utara. Dilain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha peternakan di Sumatera Utara yang sebagian besar adalah para peternak kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi peternak kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para peternak yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang dihadapi sub sektor peternakan, dan terbatas sumber daya serta kewenangan provinsi serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang yang menjadi penghambat pembangunan peternakan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan peternakan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran Sumatera Utara.

Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan fokus-fokus prioritas kegiatan serta sinergitas berbagai sumber daya, secara komprehensif dituangkan di dalam kegiatan-kegiatan baik tahunan maupun multiyears, yang diusulkan diakomodasikan untuk difasilitasi dari anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, yang terkait pada pembangunan ketahanan pangan dan peternakan adalah Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan melalui :

1. Peningkatan ketahanan pangan (food security) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk mewujudkan swasembada pangan (kedele, daging, susu dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung);

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan
3. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan;
4. Peningkatan infrastruktur pendukung (irigasi, jalan produksi dan jalan usaha tani);
5. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan;
6. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan
7. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH)
8. Peremajaan tanaman tidak menghasilkan di perkebunan
9. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/ kelautan dan kehutanan
10. Pengendalian inflasi komoditas pertanian
11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan
12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan melihat target dan sasaran pembangunan, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada, maka prioritas pembangunan ketahanan pangan dan peternakan tahun 2019 ditujukan kepada : 1) Peningkatan cadangan pangan masyarakat, 2) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan melalui peningkatan pola pangan harapan, 3) Penurunan daerah dan masyarakat yang tergolong rawan pangan, 4) Penanganan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan buah dan sayuran segar, (5) Peningkatan produksi, (6) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, (7) Peningkatan penerapan teknlogi, dan (8) Peningkatan kesejahteraan petani.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 antara lain adalah :

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N0. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. … Tahun … Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 14. Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 27 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. … Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. … Tahun 2017 Tentang Penetapan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman :

a. untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program pembangunan peternakan di Sumatera Utara.
b. penyusunan usulan fasilitasi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
c. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau instansi yang membidangi fungsi ketahanan pangan dan peternakan kabupaten / kota se-Sumatera Utara dalam penyusunan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan tahun 2019;
d. penyusunan usulan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2019.

b. Tujuan

Penyusunan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor pangan dan peternakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaskanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan dari 2.764.719 ton tahun 2016, menjadi 2.827.198 ton tahun 2017 (ASEM 2017) terjadi kenaikan produksi sebesar 62.479 ton, dan bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2017 sebesar 1.761.313 ton , masih terdapat surplus sebesar 1.065.886 ton. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, sebaiknya dikondisikan stock pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 (tiga) bulan kebutuhan pangan penduduk, Jumlah beras yang dibutuhkan Sumatera Utara Tahun 2017 untuk konsumsi penduduk sebesar 14.631.902 jiwa sebanyak 146.776,08 ton per bulan, dengan demikian posisi Sumatera Utara termasuk daerah Surplus beras.

Produksi beras di Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat significan , disisi lain kebutuhan konsumsi mengalami penurunan (hasil Survey PPH dan Konsumsi Badan Ketahanan Pangan PSU), sehingga Sumatera Utara mengalami surplus . Perkembangan produksi di Sumatera Utara sangat significan didukung adanya Program Pemerintah yang dikenal dengan Pajale (*Peningkatan produksi padi, jagung dan kedele*).

Tabel. Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras Sumatera Utara Tahun 2015 – 2017

Tahun	Produksi	Konsumsi	Surplus
2015	2.526.194	1.843.194,23	620.533,77

2016	2.764.719	1.739.437,00	1.025.281,00
2017	2.827.198	1.761.313,00	1.065.886,00

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Pengisian lumbung pangan rata – rata 2,5 – 5,8 ton gabah kering giling per unit lumbung. Pembangunan fisik lumbung bervariasi, dari sharing APBD Perintah Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan : (1) tersedia cadangan pangan daerah dan terpenuhinya cadangan pangan bagi petani/anggota kelompok, (2) terjadinya akumulasi modal usaha kelompok sebagai pendorong ekonomi perdesaan yang berorientasi kemitraan usaha antar kelompok dan mitra usaha lainnya dan (3) terjadi perubahan perilaku anggota kelompok/petani yang selama ini langsung menjual hasil panennya ke pedagang, menjadi budaya menyimpan atau menunggu menjual padinya pada saat harga gabah naik. Pengembangan cadangan pangan di Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tahun 2015 – 2016 seperti tertera pada tabel berikut;

Tabel. Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2016 – 2017

No.	Uraian Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	23 unit (47,14 ton)	20 unit (67)

2.	Cadangan Pangan Pemerintah (BULOG Divre Sumut)	66.027.110 kg	67.048,71 kg

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2016 dan tahun 2017 melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi tidak tersedia tetapi Stock beras sebagai cadangan pangan sebanyak 200 Ton beras (SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi) tersedia sepanjang tahun pada Gudang Bulog dan dapat digunakan dan dikeluarkan jika memenuhi administratif. Dari data diatas secara kasat mata dapat dikatakan bahwa total ketersediaan beras untuk Sumatera Utara tahun 2017 ada sebanyak 2.827.198 Ton.

Beberapa produksi komoditas penting mengalami pertumbuhan positif, produksi jagung mengalami kenaikan dari 1.558.141 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.741.395 ton (ASEM 2017) tahun 2017 , produksi kedele produksi tahun 2016 sebesar 5.243 Ton , tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi menjadi 7.766,4 ton (ASEM 2017). Selama 5 tahun terakhir perkembangan produksi pangan pokok mengalami pertumbuhan positip kecuali kedelai. Kacang tanah dan Ubi jalar. (tabel 2)

Tabel. Perkembangan produksi pangan pokok di Sumatera Utara tahun 2013 – 2017

N0.	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi	3.727.682	3.631.039	4.026.449	3.631.039	4.635.852
2.	Jagung	1.182.928	1.159.795	1.519.408	1.557.552	1.741.395
3.	Kedelai	3.228	5.705	6.549	5.063	7.766,4
4.	Kc.Tanah	11.352	9.777	8.517	4.872	4.381,3

5.	Ubi Kayu	1.518.222	1.381.054	1.616.955	1.228.125	980.374
6.	Ubi Jalar	116.670	116.710	122.363	91.528,1	92.256,2
7.	Daging Sapi	18.345,97	22.656,30	23.408,00	25.571,07	26.862,27
8.	Daging Ayam buras	18.435,18	16.647,62	16.904,88	17.831,07	18.559,05
9.	Telur	164.981,97	161.744,53	160.032,35	170.613,36	172.822,64

Sumber : BPS Sumatera Utara, Dinas Pertanian PSU

Dari tabel diatas terlihat bahwa produksi pangan pokok berfluktuastif di Sumatera Utara, keadaan tersebut menggambarkan semakin baiknya perkembangan dalam penyediaan pangan, dari sembilan komoditi penting , hanya 4 komoditi yang pertumbuhannya kurang optimal, bila dihubungkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi dan jumlah penduduk yang termasuk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena budaya dan kebiasaan makan masyarakat belum sesuai dengan konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.

Tabel. Data Existing Ketahanan Pangan Sumatera Utara tahun 2013 – 2017

N0.	Uraian	T a h u n				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	13.326.307	14.551.960	14.591.468	14.631.902	14.102.911
2.	Persentase penduduk miskin (%)	10,06	9,38	10,53	10,27	8,17
3.	Kualiatas konsumsi (Skor Pola Pangan	83,6	84,8	85,2	85,7	88,5

	Harapan /PPH)					
4.	Konsumsi Energi (k.kal/kap/hari)	2.0882	2.126	2.296	2.005 (ASEM)	2.125,5
5.	Konsumsi Protein (gr/kap/hari)	58,9	50,5	61,1	64,0	98,91
6.	Konsumsi Beras (kg/kap/thn)	130,61	128,65	126,32	124,8	122,5

Sumber : BPS Sumatera Utara, BKP Sumatera Utara, BKP Pusat

Tabel diatas menunjukkan data existing Sumatera Utara yang berkaitan dengan permasalahan pangan. Dapat diketahui bahwa perkembangan ketahanan pangan di Sumatera Utara cenderung semakin membaik, walaupun persentase penduduk miskin masih cukup tinggi tetapi sudah menunjukkan trend yang menurun dan juga diiringi oleh peningkatan kualitas konsumsi (Skor Pola Pangan Harapan), dan peningkatan konsumsi protein serta konsumsi beras cenderung menurun rata-rata 1,52 persen per tahun, hal ini dipengaruhi oleh mulai ditetapkannya kebijakan diversifikasi pangan melalui berbagai promosi seperti *" One day no rice "* dan pengembangan konsumsi pangan pokok lokal. Konsumsi energi rata-rata mendekati rekomendasi

Progres/perkembangan Swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2016 – 2017 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil Perimbangan swasembada beras tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 160,51 persen yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 60,51 persen , hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi ,jagung ,kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara . Di sisi lain Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan

konsumsi beras sebesar 1,5 % pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. (Data Perkembangan Swasembada pangan beras di Sumatera Utara Tahun 2016 s.d Tahun 2017 tertera pada tabel berikut).

Tabel. Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras di Sumatera Utara Tahun 2016 – 2017

Uraian	2016	2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.631.902	14.102.911
Kebutuhan Beras (ton)	1.739.437	1.761.313
Produksi Beras (ton)	2.764.719	2.908.534
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	1.025.282	1.065.886
% SSB	158,94	160,51

Sumber : BKP –PSU (data diolah)

Salah satu hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dari pertumbuhan populasi ternak dengan mengacu pada data populasi ternak sebagai berikut.

Tabel. Data Populasi Ternak (Ekor)

No.	Jenis Ternak	2016 (Ekor)	2017* (Ekor)	% Peningkatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Sapi Potong	702.120	718.757	2,36
2.	Sapi Perah	1.409	1.663	18,02
3.	Kerbau	113.422	118.200	4,21
4.	Kambing	901.565	920.620	2,11
5.	Domba	671.013	679.873	1,32
6.	Babi	1.041.959	1.138.683	9,28
7.	Ayam Buras	15.035.745	15.649.601	4,08
8.	Ayam Petelur	15.790.582	15.861.489	0,45

9.	Ayam Pedaging	54.398.314	54.968.161	1,04
10.	Itik	2.627.291	2.813.516	7,08

* Angka sementara

Pada tabel diatas, hasil pengukuran kinerja peningkatan populasi ternak tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan peningkatan dikomoditi ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 2,36%, sapi perah 18,02%, kerbau 4,21%, kambing 2,11%, domba 1,32%, babi 9,28%, ayam buras 4,08%, ayam ras petelur 0,45%, ayam pedaging 1,04% dan itik 7,08%.

Sedangkan untuk pengukuran kinerja peningkatan produksi daging, telur dan susu dilakukan dengan mengacu pada data berikut.

Tabel. Data Produksi Daging, Susu dan Telur (Ton)

No.	Jenis Komoditi	2016	2017*	% Peningkatan
1.	Daging	153.136,46	157.686,92	2,97
2.	Telur	170.613,37	172.822,64	1,29
3.	Susu	1.014,48	1.197,36	18,02

*Angka sementara

Hasil pengukuran kinerja pada tabel 8 diatas menunjukkan peningkatan produksi daging sebesar 2,97%, telur 1,29%, dan produksi susu sebesar 18,02%.

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja difokuskan terhadap capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja dan satuan pengukurannya.

Data pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Program/Kegiatan**	**Realisasi (%)**	**Capaian (%)**
						Kinerja	**Kinerja**
1		**2**		**3**	**4**	**5**	**6**
1	Ketersediaan pangan utama	1	Ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 kkal dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gr per hari	Karbohidrat : 3,884 k.kal Protein : 77.78 gr	Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	Karbohidrat : 3,796 k.kal Protein : 98.91 gr	Karbohidrat: 97,73 Protein: 127,16
		2	Ketersediaan cadangan pangan pemerintah (ton)	226		67	29,64
		3	Umbung pangan masyarakat (lumbung)	398		404	101,50
		4	Kelompok lumbung pangan (Gapoktan)	104		104	100

2	Distribusi akses pangan	1	Sistem distribusi harga (%)	100	Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	100	100
		2	Akses pangan masyarakat (kelompok)	121		110	90,90
3	Penganekaragaman konsumsi dan kemanan pangan	1	Penganekargaman onsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi beras 122.94 kg/kap/th PPH 86.5	Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	Konsumsi beras 122,95 kg/kap/th PPH 88.5	Konsumsi beras : 99,99 PPH : 102,31
		2	Konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat min. 2,220 k.kal dan protein 57.0 gr perkapita per hari	Karbohidrat : 2,200 k.kal Protein : 58.5 gr		Karbohidrat : 2,125.5 k.kal Protein : 58 gr	Karbohidrat : 96,61 Protein : 99,14
		3	Sistem penanganan keamanan bahan segar (%)	85		85	100
		4	Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok	25		25	100

			produsen di kab/kota (kelompok)				
4	Penanganan kerawanan pangan	1	Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan (%)	8,67	Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	8,17	94,23
		2	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan (desa)	75		132	176
5	Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan	1	Efektivitas koordinasi kelembagaab Dewan Ketahanan Pangan (%)	88	Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	88	100
6	Meningkatnya nilai tukar petani	1	NTP sub sektor peternakan (%)	109,09	Program peningkatan kesehjahteraan petani	112.34	102,97
7	Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)	1	Produksi daging (ton)	159,015.87	Program peningkatan produksi hasil peternakan	157,686.46	99,16
		2	Produksi telur (ton)	157,060.75		172,822.64	110,03
		3	Produksi susu (ton)	1,057.54		1,197.36	113,22
8	Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi Peternakan	1	Jumlah akseptor Inseminasi Buatan (ekor)	125.900	Program peningkatan pemanfaatan teknologi	136.363	108,31
		2	Jumlah kelahiran Inseminasi	68.000		26.915	39,58

			Buatan (ekor)				
9	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	1	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1.82	Program pengembangan agribisnis		

Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, menunjukkan bahwa dari 9 sasaran yang telah ditetapkan, mayoritas menunjukkan peningkatan, walaupun ada indikator yang belum menunjukkan hasil yang optimal.

Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan energi rata – rata penduduk Sumatera Utara mengalami penurunan dari 3.900,7 K.kal/kap/hari pada tahun 2016 menjadi 3.796 k.kal/kap/hari pada tahun 2017, angka ini belum melampaui target ketersediaan energi yang sebesar 3.884 k.kal/kap/hari. Sedangkan angka ketersediaan energi mengalami kenaikan dibandingkan dari capaian tahun 2016 yang sebesar 64,08 gr/kap/hari menjadi 98,91 gr/kap/hari dan capaian tersebut telah melampaui target capaian kecukupan energi protein tahun 2017 yang sebesar 77,78 gr/kap/hari. Untuk ukuran nasional, keadaan ini menggambarkan ketersedian pangan di Sumatera Utara sangat aman, karena target nasional ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 k.kal/kap/hari dan penyediaan protein 63 gr/kap/hari.

Sumatera Utara juga mengalami surplus beras sebanyak 1.065.866 ton, dimana kebutuhan beras penduduk Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 1.761.313 ton sedangkan ketersediaan beras mencapai 2.827.198 ton. Jika

diasumsikan kebutuhan konsumsi beras penduduk Sumatera Utara sebesar 146.776,08 ton/bulan, maka ketersediaan cadangan pangan Sumatera Utara aman untuk 7 bulan ke depan.

Jumlah kelembagaan pangan yang mendukung cadangan pangan pemerintah daerah seperti kelompok lumbung pangan masyarakat di Sumaera utara sampai tahun 2017 sebanyak 404 unit. Untuk tahun 2017 dari target 29 Lumbung Pangan hanya terealisasi 26 lumbung, selain itu telah difasilitasi 104 Gapoktan yang berfungsi sebagai cadangan pangan

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan penguatan lembaga kepada Gapoktan berupa fasilitasi terpal sebanyak 1 gulung kepada 50 Gapoktan dan pemberian fasilitas mesin press kemasan serta timbangan kepada 30 Gapoktan serta pemberia fasilitas lantai jemur dan mesin perontik jagung kepada 1 Gapoktan melalui kegiatan pembinaan LUEP dimana anggaran pembinaan Gapoktan tersebut berasal dari APBD. Selain itu dari anggaran APBN terdapat pemberian bantuan kepada 29 Gapoktan masing – masing sebesar Rp. 60.000.000 (Tahap Pengembang PUPM) dan 4 Gapoktan dengan masing – masing bantuan sebesar Rp. 50.000.000 (Tahap Pengembang PLDPM).

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa target dari sasaran pertama dapat tercapai, hal ini didukung oleh kerjasama dan koordinasi dari semua pihak yang terkait dengan ketersediaan pangan, baik instansi teknis seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Kab/kota yang berhsil melaksanakan Gerakan Pajale mendukung swasembada padi berkelanjutan dan penyediaan cadangan pangann melalui penurunan konsumsi beras.

Distribusi Akses Pangan

Data perkembangan harga tahun 2017 , harga rata-rata **padi GKP** tingkat penggilingan Rp. 4.806/kg dengan kisaran harga Rp 3.845/kg – Rp 5.945(CV = 2,56 %), harga rata-rata **padi GKG** tingkat petani Rp. 4.492/kg (CV = 2,82 %). Rata-rata **beras medium** tingkat penggilingan sebesar Rp 9.299/kg dengan kisaran harga Rp 8.335/kg – Rp 10.420/kg (CV= 0,28). Rata-rata harga **beras premium** tingkat penggilingan Rp 10.632/kg dengan kisaran Rp. 8.443/kg – Rp 14.991/kg (CV=1,47), **Beras Medium** tingkat pedagang grosir sebesar Rp 10.684/kg dengan kisaran Rp.7.416 – Rp 14.700/kg. **jagung** pipilan kering tingkat pedagang grosir rata-rata sebesar Rp. 4,845/kg dengan kisaran Rp 2.856 – Rp. 7.350/kg. **kedele** tingkat pedagang grosir sebesar Rp 9.631/kg dengan kisaran Rp 5.775 – Rp 15.225/kg. **Cabai merah** tingkat pedagang grosir sebesar Rp 28.028/kg dengan kisaran Rp 12.450 – Rp 52.500/kg(CV= 24,65). **Daging ayam ras** tingkat pedagang grosir sebesar Rp 27.930/kg dengan kisaran Rp 17.063. – Rp 39.900/kg.(CV= 6.29). **Telur Ayam Ras** Tingkat pedagang grosir rata-rata Rp 21.229/kg dengan kisaran harga Rp.15.750/kg – Rp 34.781/kg. Harga rata-rata **Daging Sapi Murni** tingkat pedagang grosir sebesar Rp 111.354/kg dengan kisaran Rp 92.400 – Rp 129.150/kg. Tingkat pedagang eceran **Beras Premium** rata-rata Rp 12.354 /kg dengan kisaran harga Rp.10.041/kg – Rp16.748/kg. Tingkat pedagang eceran **Beras Medium** rata-rata Rp11.354 /kg dengan kisaran harga Rp.9.077/kg – Rp14.648/kg. . Harga rata-rata **jagung** pipilan kering tingkat pedagang eceran sebesar Rp 5.671/kg dengan kisaran Rp3.140 – Rp8.768/kg. **Kedelai biji kering** tingkat pedagang eceran rata-rata Rp 10.689 /kg dengan kisaran harga Rp.6.300/kg – Rp18.375/kg. **Bawang merah** tingkat pedagang eceran rata-rata Rp 31.425/kg. Harga rata-rata **Cabai merah** tingkat pedagang eceran rata-rata Rp 30.831/kg dengan kisaran harga

Rp.13.695/kg – Rp 57.750/kg.(CV=24,65). Harga rata-rata **Gula pasir** tingkat pedagang eceran sebesar Rp 15.765/kg dengan kisaran Rp.11.550 – Rp 20.541/kg. **Daging ayam ras** tingkat eceran sebesar rata-rata Rp 30.610/kg dengan kisaran Rp 17.784 – Rp 43.733/kg (CV=6,64). Harga rata-rata **Telur Ayam ras** tingkat pedagang eceran rata-rata Rp 23.359/kg dengan kisaran harga Rp.16.800/kg – Rp36.122/kg. Harga rata-rata **Daging Sapi** tingkat pedagang eceran sebesar Rp 121.399/kg dengan kisaran Rp100.800 – Rp 151.410/kg. Harga rata-rata **Minyak goreng curah** tingkat pedagang eceran sebesar Rp 12.589 dengan kisaran Rp 8.951 – Rp 16.170,-/kg

Pemantauan harga-harga di 33 kabupaten/kota dilakukan oleh 69 orang petugas enumerator kab/kota serta 1 orang petugas enumerator provinsi, yang dilaksanakan selama 44 minggu (SMS Mingguan), jumlah laporan yang masuk sebanyak 100 persen, yang berarti sudah tercapai, sesuai target. Dari hasil analisis bahwa rata-rata kenaikan harga (CV) semua dibawah 10 % kecuali cabe merah, ditingkat grosir sebesar 24,65 dan ditingkat pedagang eceran sebesar 24,65 %.

Tahun 2017 telah terlaksanan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat kepada 110 kelompok di 26 kab/kota. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan ternak seperti ternaksapi potong, kerbau, kambing, ayam buras, itik, babi, entok, domba serta ikan mas.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola Pangan harapan Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 85,7 dan tahun 2017 meningkat menjadi 88,5 atau meningkat sebesar 2,91%. Pencapaian tersebut juga melampaui target pencapaian PPH yaitu sebesar 86,5. Akan tetapi angka yang

dicapai tersebut masih dibawah angka tahun harapan 2019 yaitu sebesar 92,5. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk masih belum beragam, begizi dan berimbang antar kelompok pangan, yang menandakan konsumsi masyarakat terhadap kelompok bahan pangan masih belum bervariasi. Sedangkan konsumsi beras pada tahun 2017 sebesar 122,95 kg/kap/tahun bila dibandingkan dengan konsumsi beras pada tahun 2016 yang sebesar 124,80 kg/kap/tahun maka terjadi penurunan sebesar 1,48% (mencapai 98,66% dari target penurunan 1,5% per tahun.

Konsumsi energi penduduk Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 2.125,5 kkal/kap/hari dan capaian ini melebihi capaian tahun 2016 yang sebesar 2.005 kkal/kap/hari walaupun capaian tesebut belum sesuai dengan target 2017 yang sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Meskipun telah terjadi penurunan konsumsi beras perkapita, tetapi perimbangan konsumsi energi belum merata, masih didominasi oleh beras, sedangkan umbi – umbian masih rendah. Untk konsumsi protein mengalami penurunan dari 64 gr/kap/hari pada tahun 2016 menjadi 58 gr/kap/hari.

Pengawasan mutu dilaksanakan terhadap 84 sampel buah dan sayuran segar yang berasal dari petani maupun yang beredar di pasar tradisional maupun modern di 28 kabupaten/kota. Pengujian dilaksanakan dengan 2 parameter uji yaitu residu pestisida dan mikrobiologi (E. *coli* dan Salmonella) atau logam berat (Pb, Cd). Dari hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui uji laboratorium beberapa sampel terdeteksi cemaran mikrobiologi yaitu *E. coli* diatas ambang batas cemaran

Tahun 2017 Telah dilakukan sertifikasi untuk 7 Kab/Kota yaitu Deli Serdang, serdang Bedagai, Batu Bara, Karo, Simalungun, Samosir dan Toba Samosir dengan

komoditi yang di sertifikasi sebanyak 25 sayur/buah. Capain kinerja sebesar 100 persen.

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa target dari Sasaran ketiga dapat tercapai, hal ini disebabkan dimana terjadi penurunan konsumsi beras sebesar 1,8 persen dari tahun 2016. Untuk target Pola Pangan Harapan (PPH) telah melewati target, ini disebabkan karena telah tersosialisasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pola pangan yang beragam, berimbang dan sehat, tentunya masih dibutuhkan kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Budaya di Sumatera Utara " *tidak kenyang kalau tidak nasi* " pelan-pelan harus dihilangkan dengan menaikkan citra pola pangan beragam dan pencitraan dan penampilan pangan lokal non yang lebih menarik dan berdaya saing .

Penanganan Kerawanan Pangan

Persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2017 sebanyak 8,17%, jumlah ini berkurang dibanding tahun 2016 yang sebesar 10,27%, bila dihungkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, persentase penduduk miskin yang didapat dan jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup besar walaupun telah menunjukkan tren yanh menurun.

Penanganan desa miskin/rawan pangan pada tahun 2017 dilaksanakan di sebanyak 132 desa melalui:

1. Pemberdayaan melalui program aksi Gema Pangan (Pergub No. 25 tahun 2009) dilaksanakan di 33 kab/kota. Pada tahun 2017 masing total bantuan yang diberikan adalah ternak babi sebanyak 430 ekor, kambing 425 ekor,

kerbau 14 ekor, itik 1.965 ekor, buras 6.756 ekor, domba 255 ekor dan sapi 8 ekor

2. Penanganan desa rawan pangan/miskin melalui program bantuan sosial rawan pangan di Kabupaten Mandailing Natal dan kota Padang Sidempuan berupa bantuan bahan pangan yang terdiri dari beras IR ± 4.900 kg, gula pasir 200 kg, minyak goreng @ 2 liter sebanyak 200 sachet, mie instan sebanyak 290 kotak dan terakhir ikan kaleng @ 425 gr sebanyak 289 kaleng.
3. Pemberdayaan desa rawan pangan, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis yaitu pada pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan yaitu beras sebanyak 6.500 kg, gula 600 kg, minyak goreng @ 2 liter sebanyak 646 sachet, mie instan 450 kotak dan ikan kaleng @ 425 gram sebanyak 550 kaleng.
4. Penanggulangan/penanganan balita gizi kurang dan masyarakat tergolong rawan pangan di 30 kab/kota yaitu Kab. Langkat, Kab Dairi, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing tinggi, kab. Karo, kab. Padang Lawas, Kab. Pakpak bharat, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kota P. Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhan batu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasudutan, Kab. Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias Selatan. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan dimana masing – masing kabupaten/kota menerima : Beras Kuku Balam 2.000 kg, gulapasir

350 kg, kacang hijau 200 kg, Marie Susu Biskuit @ 180 gr sebanyak 600 bungkus dan Susu Bubuk 1 Plus @ 900 gr sebanyak 400 kotak.

5. Kegiatan Penguatan Usaha Kelompok dalam Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Pengadaan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yang dialokasikan pada daerah miskin/rawan pangan, yaitu pemberian bantuan penguatan modal kelompok kepada: Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab.tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kab. Tapanuli Utara, Kab.Toba Samosir, Kab. Humbang hassudutan, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Kota Tebing tinggi, Kota P. Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Karo, kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan batu, kab. Labuhan batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kab. Langkat

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa target dari sasaran keempat dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran yang tersedia untuk penanganan rawan pangan baik transien maupun kronis, disisi lain gencarnya pemerintah memerangi kemiskinan dan kelaparan/kerawanan pangan

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan

Dari 33 kelembagaan yang menangani ketahanan pangan di kab/kota, telah terbentuk sebanyak 30 kb/kota yang membentuk Dewan Ketahanan Pangan (88%) di wilayahnya, dan telah dilaksanakan rapat koordinasi Dewaan Ketahanan Pangan di kab/kota serta provinsi yang difasilitaaasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil analisis pencapaian target dan sasaran kelima pada umumnya menunjukkan capaia kinerja terlaksanan dengan baik, capaian ini perlu ditingkatkan lagi melalui kinerja dan efektivitas untuk tahun yang akan datang, khusunya yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan yang mendukung pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan di Sumatera Utara

Meningkatnya Nilai Tukar Petani Peternak

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(term of trade)* dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai Januari 2014 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di pedesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas indeks yang diterima petani (It) maupun indeks yang dibayar petani (Ib). Penghitungan NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada Subsektor Perikanan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan It terhadap Ib, dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Pada akhir bulan Desember 2017, NTP peternakan sebesar 112,34 atau sudah mencapai 102,97 % dari target yang ditetapkan yaitu 109,09. Hal ini karena perubahan It lebih tinggi dibandingkan perubahan pada Ib. Kenaikan yang terjadi pada It karena kenaikan indeks subkelompok ternak besar, indeks subkelompok ternak kecil, dan indeks subkelompok hasil ternak. Sedangkan indeks subkelompok unggas turun. Sementara itu, penurunan yang terjadi pada Ib karena perubahan pada indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) yang turun dan indeks BPPBM yang juga turun.

Sedangkan untuk perbandingan antara tahun-tahun sebelumnya NTP sub sektor Peternakan di yang dicapai dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
NTUP	104,03	106,46	108,8	112,46	112,34

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tukar petani (NTP) sub sektor peternakan dari tahun ke tahun (2013-2017) menunjukkan fluktuasi, tetapi cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani (dalam hal ini

peternak) yang salah satu faktornya ditopang oleh program-program yang terlaksana dari pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Meningkatnya Produksi Daging, Telur Dan Susu

Hasil pengukuran kinerja untuk produksi daging, telur dan susu pada tahun keempat (2017) pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Produksi daging yang dimaksud adalah banyaknya jenis ternak yang dipotong baik itu yang berasal dari populasi ternak yang ada maupun dari jumlah ternak yang didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Utara tetapi dipotong di Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan populasi ternak di Sumatera Utara berdampak terhadap Produksi Daging. Dari Tabel dibawah dapat dilihat data produksi daging di Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 153.136,46 ton dan pada tahun 2017 sebesar 157.686,92 ton, hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,97% namun kurang optimal dalam pencapaian target yang ditentukan dalam renstra yaitu sebesar 99,16%. Adapun target peningkatan produksi daging tahun 2017 menurut Renstra adalah sebesar 159.015,87 ton.

Sedangkan dari tabel berikut dapat dilihat perkembangan produksi ternak (daging, susu dan telur) selama 5 tahun terkahir.

Tabel. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2013 - 2017 (Ton)

No	KOMODITI	TAHUN				
	DAGING	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I	**DAGING**					
1	Sapi	18,436.60	22,656.29	23,407.97	25,571.07	26,862.27
2	Kerbau	3,395.12	4,170.20	4,193.50	4,659.19	4,969.53
3	Kambing	3,469.81	3,538.23	3,546.08	3,959.07	3,982.88
4	Domba	1,852.71	1,886.78	1,890.18	2,410.58	2,439.04
5	Babi	39,211.68	40,907.11	42,030.37	41,902.18	43,262.26
6	Kuda	56.79	53.77	56.96	58.52	59.65
7	Ayam Buras	18,435.18	16,647.62	16,904.89	17,831.07	18,559.05
8	Ayam Ras Petelur	11,074.32	10,463.48	10,723.86	11,135.15	11,185.16
9	Ayam Ras Pedaging	37,835.60	38,751.75	40,902.39	42,814.83	43,388.79
10	Itik	2,082.10	2,038.90	2,183.69	2,267.95	2,428.71
11	Kelinci	6.76	7.40	7.38	5.40	6.01
12	Puyuh	72.09	63.79	64.21	71.43	74.37
13	Merpati	9.71	10.00	8.57	7.07	7.41
14	Itik Manila	269.20	444.65	432.98	442.92	461.72
JUMLAH		**136,207.69**	**141,639.97**	**146,353.03**	**153,136.43**	**157,686.85**

II	**TELUR**					
1	Ayam Buras	12,703.50	11,471.71	11,648.99	12,287.21	12,788.85
2	Ayam Ras Petelur	140,710.63	132,949.22	136,257.70	141,483.61	142,118.94
3	Itik	11,563.08	11,323.16	12,127.27	12,595.23	13,488.00
4	Puyuh	568.19	502.77	506.06	562.98	586.17
5	Itik Manila	2,239.27	3,698.64	3,601.61	3,684.33	3,840.68
JUMLAH		**167,784.66**	**159,945.50**	**164,141.63**	**170,613.36**	**172,822.64**
III	**SUSU**	**1,368.72**	**783.36**	**776.16**	**1,014.48**	**1,197.36**

*) Angka Sementara

Sumber : Buku Statistik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu 2017

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging dan terjadinya peluang ekspor daging di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah terus mengupayakan peningkatan populasi ternak besar maupun kecil. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain adalah dengan jalan melakukan penyebaran ternak maupun bibit ternak, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai peternak.

Produksi telur pada tahun 2017 meningkat menjadi 172.822,64 ton atau sekitar 1,29% dari tahun 2016 (170.613,36 ton). Produksi telur yang dimaksud

adalah jumlah telur ayam, itik dan puyuh yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara. Target produksi telur yang ditentukan pada tahun 2017 adalah sebesar 157.060,75 ton atau mencapai 110,03%. Target yang ditetapkan untuk peningkatan produksi telur selain untuk mencukupi kebutuhan lokal Provinsi Sumatera Utara juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena telur yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Utara sudah melebihi kebutuhan masyarakat lokal. Namun target ini belum tercapai secara optimal, untuk itu diperlukan dukungan dan kerja keras seluruh pihak terkait untuk mensukseskan target ini.

Produksi susu pada tahun 2017 sebesar 1.197,36 ton. Produksi susu ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 1.014,48 ton atau sebesar 18,02%. Target produksi susu yang ditentukan pada tahun 2017 adalah sebesar 1.057,54 ton atau tercapai 113,22%. olahan.

Meningkatnya hasil dari Pemanfaatan Teknologi Peternakan

Hasil kinerja untuk hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari jumlah akseptor inseminasi buatan dan jumlah kelahiran inseminasi buatan.

Jumlah akseptor inseminasi buatan dan jumlah kelahiran inseminasi buatan tahun 2017 yaitu 136.363 ekor dan 26.915 ekor. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam renstra mengalami pencapaian yang optimal yaitu 125.900 ekor (108,31%) untuk jumlah akseptor inseminasi buatan, sedangkan untuk jumlah kelahiran dari inseminasi buatan kurang mencapai target yang ditetapkan yaitu 68.00 ekor (39,58%). Hal ini disebabkan karena mayoritas ternak akseptor sampai dengan

masa akhir tahun anggaran 2017 masih dalam masa kebuntingan, sehingga kelahiran akan terjadi pada tahun 2018.

Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan data PDRB adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Di tingkat Provinsi Sumatera Utara maka yang berwenang adalah BPS Provinsi Sumatera Utara. Periodisasi publikasi data PDRB oleh BPS adalah tahunan.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD antara lain adalah:

1) Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
2) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
3) Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal
4) Peningkatan penanganan kerawanan pangan sebagai tindak lanjut pengentasan kemiskinan
5) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
6) Peternakan merupakan corebisnis di lingkup pertanian yang masih mempunyai peluang pengembangan yang besar, dalam menggerakkan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan;
7) Potensi populasi ternak domba/kambing belum mampu memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor;
8) Masih merebaknya ancaman penyakit hewan menular (PHM);
9) Masih tingginya tingkat kendala petenak dalam pengembangan budidaya ternak terhadap ketersediaan bibit, pakan dan pemasaran;
10) Masih rendahnya produksi dan produktifitas peternakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging, dan susu;

11) Masih belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas unggulan disetiap Kabupaten. Sehingga input produksi menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk;
12) Masih belum kondusifnya lembaga keuangan yang mudah diakses oleh para peternak dalam penyediaan sumber pembiayaan usaha peternakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa proses perencanaan adalah suatu tahapan yang sinambung yang dimulai dengan Persiapan penyusunan Renja; Penyusunan rancangan awal Renja; Penyusunan rancangan Renja; Pelaksanaan Forum SKPD; Perumusan rancangan akhir Renja; dan Penetapan Renja. Sebelum Renja ditetapkan perlu adanya analisis kebutuhan yang bertujuan menentukan program dan kegiatan dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini penting dilakukan karena berbagai faktor antara lain :

1. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah;
2. Keterbatasan Anggaran, dll.

Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat, Hasil Reses DPRD ke daerah dan Hasil koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK tahun 2014, hal ini disampaikan berdasarkan usulan dari kabupaten/kota melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Sebelum usulan SKPD provinsi disampaikan terlebih dahulu dilaksanakan rapat koordinasi program/kegiatan teknis tahun 2018 untuk mensinkronkan kegiatan daerah dan provinsi dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Analisa kajian terhadap rancangan awal RKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala prioritas primer,sekunder dan tersier program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit Eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tersebut kedalam Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana kerja yang telah disusun dan selanjutnya ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Kajian terhadap rancangan awal RKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut dan hasil Korsup KPK tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran.

1. Pengembangan ketersediaan pangan pokok karbohidrat dan protein.
2. Pengembangan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat 29 unit
3. Pengadaan dan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah provinsi tahun 2016 sebanyak 186 ton
4. Pembinaan dan pemberdayaan 99 Gapoktan
5. Stabilisasi harga bahan pangan strategis melalui pengembangan 6 (enam) lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP).
6. Monitoring panel harga bahan pangan pokok dan strategis di 18 kab/kota
7. Pendampingan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (p-LDPM) 8 unit
8. Penguatan usaha Usaha Kelompok dalam rangka peningkatan Akses Pangan Masyarakat di 20 Klpk
9. Kajian akses pangan berdasarkan indikator ekonomi terhadap pemantapan pangan pedesaan dan rumah tangga di 7 kab/kota
10. Diversifikasi usaha dalam meningkatkan akses pangan masyarakat di 10 klp/5 kab/kota
11. Survey Pola Pangan Harapan (PPH) tahunan di Sumatera Utara
12. Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
13. Pengembangan makanan tradisional pangan lokal di Provinsi Sumatera Utara

14. Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
15. Pemberdayaan kelompok wanita melalui pengembangan kawasan rumah pangan Lestari (KRPL).
16. Pendampingan industri pengolahan pangan lokal dan tepung-tepungan pada kelompok home industri dan kelompok wanita tani di 33 kab/kota
17. Pengawasan peredaran mutu buah dan sayuran segar serta uji lab. Residu pestisida.
18. Peningkatan kawasan dan pemantapan kelembagaan otoritas kompetensi keamanan pangan daerah (OKKPD)
19. Sertifikasi buah dan sayuran segar
20. Survey pemantauan masyarakat yang mengalami defisit angka kecukupan energi (AKE) tahun 2016
21. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
22. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMAPANGAN) di 33 kab/kota
23. Pemberdayaan daerah rawan pangan transien dan kronis di 33 kab/kota
24. Penyusunan peta Food Security Vulnerability atlas (FSVA) tingkat Provinsi dan kabupaten
25. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
26. Pembinaan dan penanggulangan gizi kurang di daerah rawan pangan
27. Fasilitasi koordinasi dan penguatan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
28. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk, disampaikan oleh dinas yang membidangi fungsi ketahanan pangan dan peternakan di kabupaten/ kota kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahanan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Fakta menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) menyarankan ketersediaan pangan/energi minimal sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kap/hari.

Sejalan dengan perubahan paradigma dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian bioindustri berkelanjutan, periode 2015 – 2019 pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan fokus pada pemgembangan lima bahan pangan pokok strategis yaitu : padi, jagung, kedele, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau.

Undang-undang pangan No. 18 tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan pangan diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam penciptaan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Kebijakan umum Nasional yang berkaitan dengan tupoksi Badan Ketahanan Pangan adalah :

1. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedele, serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing ekspor, subsitusi impor serta bahan baku bioindustri
3. Kebijakan penguatan sistem kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan
4. Kebijakan Pengembangan kawasan pertanian

5. Kebijakan fokus komoditas strategis

Dengan memperhatikan faktor – faktor kunci keberhasilan yang ada guna terwujudnya tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan kebijakan yang akan dijadikan pedoman di dalam melaksanakan kegiatan operasional peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan kerawanan pangan , distribusi dan akses pangan dan konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

1. Kebijakan dalam Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Strategi dan Kebijakan Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Strategi dan Kebijakan yang dilakukan selama ini antara lain:

- Tersedianya keanekaragaman produk pangan olahan dan Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan hewani melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melaksanakan 4 (empat) usaha pokok yaitu: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi dengan dukungan sepenuhnya dari kredit program sehingga ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi.
- Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi kelaparan serta pengembangan jaringan pengaman pangan bagi kelompok rawan pangan transien karena bencana alam dan sosial.

Strategi dan kebijakan khususnya untuk meningkatkan ketersediaan pangan sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan Produktivitas melalui Inovasi Teknologi Baru

Untuk mendorong peningkatan produktivitas dilakukan pengwilayahan sesuai kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi ataupun integrasi terpadu ternak dengan tanaman pangan disertai dengan pengembangan rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi.

Untuk mendukung percepatan proses, adopsi inovasi teknologi baru, dilakukan revitalisasi lembaga penyuluhan melalui peningkatan kapasitas unit kerja lingkup tanaman pangan dan hortikultura di provinsi dan kabupaten.

Peningkatan produksi padi sangat dibutuhkan dalam rangka swasembada tahun 2015 serta mengantisipasi berkurangnya luas tanam padi, selain itu juga dilakukan gerakan peningkatan penggunaan benih bermutu serta sarana produksi di lokasi yang telah ditetapkan.

2. Cadangan pangan.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi minimal 3 (tiga) bulan ke depan. Selain itu, juga ditingkatkan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya.

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis lingkungan

Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilakukan melalui

a. Kebijakan pengembangan ekonomi pertanian rakyat dan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing melalui pengembangan kawasan, ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis, mempertahankan swasembada beras, dan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan dan hortikultura selain padi.

b. Peningkatan promosi sektor – sektor pangan dan olahannya sebagai unggulan setiap kabupaten/kota.

c. Pengembangan RPL dan tepungisasi

d. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah melalui perencanaan pembangunan yang terdiri atas peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pangan, pemyempurnaan dan pengembangan data dan statistik

pangan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan pangan antar daerah.

2. Strategi dan Kebijakan dalam Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan

Untuk pengembangan distribusi dan akses pangan di Sumatera Utara, strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan adalah melalui:

- Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi bahan pangan melalui reformasi berbagai peraturan yang menghambat lalu lintas perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana distribusi serta pelayanan teknologi pasca panen-sarana dan prasarana pasca panen, pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah
- Sistem informasi pasar dan lembaga pemasaran daerah.
- Peningkatan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menstabilkan harga bahan pangan antar waktu maupun antar wilayah. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan di Sumatera Utara (padi, jagung, kedelai-on going) terus dilakukan karena: masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga bisa tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu paceklik; harga pangan dunia semakin tidak menentu dan indonesa sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan dalam Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal konsumsi, mutu dan keamanan pangan antara lain:

- Penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat sebesar 1.5 persen per tahun melalui diversifikasi konsumsi dan manggadong.
- Peningkatan Penganekaragaman konsumsi bahan pangan yang seimbang baik jenis (nabati atau hewani) maupun mutu dan gizi.
- Peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang berbasis pada non beras.
- Peningkatan pembinaan keamanan, mutu dan gizi pangan, mulai dari Prima 3, Prima 2 dan Prima 1.

Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sumatera Utara seperti terlihat pada Tabel 5 dibawah.

Tabel 5. Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak mendukung kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan	Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2015-2019	-

Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 tahapan menuju pertanian industri. Tahapan periode tahun 2015-2019 dirumuskan untuk kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan, sehingga pada tahun 2045 yaitu tahapan akhir pertanian bioindustri, dapat terwujud tahapan pertanian Indonesia bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak langkah yang akan ditempuh pembangunan pertanian adalah (i) menjadikan komoditas ekspor, penyedia bahan baku bioindustri dan bio energy dengan pendekatan kawasan, (ii) meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, (iii) menyediakan prasarana dan sarana dasar pertanian, (iv) memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan (v) meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat
sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal

Indonesia memiliki sumber daya plasma nutfah yang merupakan sumber daya genetik lokal yang berlimpah. Oleh karena itu pelestarian dan pemanfaatannya melalui berbagai program konversi dan pemuliabiakan harus terus dilanjutkan dan menjadi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melindungi

sumber daya genetic local pemerintah telah menyusun pelestarian dan pemanfaatan ternak local yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: ternak asli sapi yang meliputi 6 rumpun, kerbau 6 rumpun asli, kambing 5 rumpun, domba 6 rumpun, ayam 7 rumpun, itik 13 rumpun dan kuda 1 rumpun asli. Pemerintah akan mengatur dari sisi konsumsi ternak tersebut dan pelestariannya.

2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan

Pemerintahan Jokowi JK telah memutuskan untuk membangun dari pinggiran. Oleh karena itu fokus pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan kepada pembangunan kawasan. Telah diputuskan terdapat 100 kawasan pengembangan sapi potong, 13 kawasan pengembangan kebau, 11 kawasan pengembangan kambing, 6 kawasan pengembangan sapi perah, 5 kawasan pengembangan domba dan 9 pengembangan kawasan babi diberbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan kawasan akan memperkuat kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan yang diharapkan dapat memperkuat simpul-simpul pelayanan teknis pelayanan ekonomi lainnya.

3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis

Penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan teknis merupakan menjadi dua hal yang saling mendukung. Pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan menjadi optimal apabila ada infrastrukturnya. Oleh karena itu dalam hal pelayanan teknis melalui fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan keswan yaitu pelayan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen masing-masing memerlukan infrastruktur sesuai dengan fungsinya. Pelayanan fungsi-fungsi peternakan sangat memerlukan adanya unit pelayanan teknis yang dapat menjangkau sampai ditingkat lapangan. Oleh karena itu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diperlukan penguatan UPT baik UPT pusat maupun UPT daerah. Ditingkat lapangan juga akan diperkuat infrastruktur pelayanan fungsi yaitu pendirian *village breeding center*, lumbung pakan, puskeswan, pos IB, sampai kepada sarana padang penggembalaan terutama di wilayah timur Indonesia.

4. Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing

Pemberdayaan peternak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2013 bahwa pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Dengan demikian pemberdayaan peternak mencakup daya saingnya. Untuk ini akan dibuka akses dan kemudahan peternak terhadap sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan

Angkatan kerja peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kecenderungan yang semakin menua. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha peternakan dan kesehatan hewan mulai tidak menarik bagi generasi muda. Data sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2013 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak lebih dari 2,4 juta orang (58,7%) sedangkan komposisi tenaga kerja perempuan lebih dari 1,7 juta orang (41, 3%) pada umumnya tenaga kerja perempuan berpendidikan SD masih cukup dominan. Data sakernas menunjukkan juga bahwa lebih dari 1,6 juta orang (37,1%) berpendidikan SD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan menjadi kunci dari strategi lainnya. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui program pemerintah selalu terkait di dalamnya untuk peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM.

6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa penerapan teknologi merupakan faktor terpenting untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Saat ini tingkat kematian, angka kesakitan, pertambahan berat badan, lamanya *calving interval* dan masalah kurangnya pakan pada musim kemarau

dan masih lemahnya penataan pemotongan ternak (TPH) disadari dapat dipecahkan dengan penerapan teknologi dibidang pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner melalui teknologi dan bioteknologi. Penerapan teknologi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Demikian juga untuk sistem informasi akan ditempuh mengikuti perkembangan yang berbasis computer, antara lain: dibidang perencanaan sudah mulai diterapkan *eplanning* dan bidang pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement.* Dibidang teknis pelayanan dikembangkan sms gateway untuk pemotongan ternak dan ISIKHNAS untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menjadi bagian *e-government.*

7. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam hal regulasi penguatan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Sebagai turunannya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah banyak menyusun Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan perkembangan, berbagai peraturan tersebut akan mengalami penambahan, revisi, atau pencabutan.

8. Mendorong insentif peternakan

Mendorong insentif peternakan akan dilakukan ditngkat peternak maupun badan usaha berbentuk koperasi, BUMN, BUMD dan Perusahaan. Insentif dapat diberikan dalam pemberian bantuan modal khususnya kepada peternak sasaran, pembebasan bea masuk untuk bibit, pembebasan pajak dan berbagai kemudahan lainnya untuk menarik investasi. Diakui bahwa investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan realisasinya masih rendah tidak sesuai harapan. Dalam rangka menuju kemandirian dan keamanan pangan menuju bioindustri peternakan dan kesehatan hewan maka berbagai bentuk insentif akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Insentif mengandung arti “perlindungan” terhadap petani

peternak dan sumber daya lokal. Oleh karena itu bentuk-bentuk insentif ini akan berbeda dengan untuk korporasi.

9. Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak

Mata rantai yang panjang komoditas ternak dan produknya sudah lama disadari. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke Jakarta sebagai wilayah konsumen menyebabkan peternak menerima *margin* keuntungan yang kecil dibandungkan pedagang, distributor dan pengecer. Untuk peternakan unggas khususnya ayam ras masalah tata niaga dan pemasaran produknya terjadi sebagai akibat pertentangan antara peternak mandiri, kemitraan dan perusahaan. Perusahaan cenderung mengusahakan dalam usaha yang terintegrasi sehingga usahanya menjadi lebih efisien. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian terkait. Dengan Kementerian Perhubungan terus dijajaki adanya pengadaan kapal ternak untuk lebih meningkatkan pendapatan peternak di daerah produsen sebagai akibat berkurangnya kerugian pasca panen. Selain itu di daerah-daerah produsen ternak akan dibangun rumah potong hewan (RPH) modern sehingga angkutan ternak digantikan oleh mata rantai dingin untuk mengurangi perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah *animal welfare*. Dengan Kementerian Perdagangan terus akan dilakukan kerjasama dalam bentuk tim misalnya tim harga agar harga tidak naik dan menyesuaikan dengan *suplay* ternak lokal.

Untuk mencapai visi daerah “menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera” maka ditetapkan visi yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Visi misi tersebut dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran daerah. Tujuannya adalah Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing dengan sasran meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tesebut adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap

memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan. Arah kebijakan yang direncanakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Uraian kebijakan nasional, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah diatas kemudian diterjemahkan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas.

Visi Dinas Peternakan untuk mendukung kebijakan nasional dan kebijakan daerah adalah "Terwujudnya swasembada pangan asal ternak yang berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera." Ada 4 (empat) misi untuk mendukung visi tersebut antara lain adalah:

1) menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas yang berdaya saing
2) memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi peternakan secara optimal
3) menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat
4) menciptakan lapangan pekerjaan dibidang agribisnis peternakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan pangan, pengkajian dan perumusan serta pengembangan pemantauan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencapai kemandirian pangan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan.

6. terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor
7. optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan
8. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak
9. tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan.
2. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan skor mutu pola pangan harapan serta berkurangnya konsumsi pangan beras per kapita.
3. Meningkatnya pemanfaatan tekhnologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan.
5. Berkembangnya industri dan bisnis pangan dan penyebarannya meliputi seluruh kabupaten / kota di Sumatera Utara.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan.
7. meningkatnya populasi ternak
8. meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan
9. meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)
10. meningkatnya nilai tukar petani peternak
11. persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

Tabel. Indikator kinerja tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

c. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas maka strategi yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Pengembangan produk-produk pangan olahan bersumberdaya lokal yang memiliki daya saing
2. Penguatan struktur kelembagaan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pengembangan usaha pangan masyarakat melalui Toko Tani Indonesia
4. Peningkatan ketersediaan pangan khususnya daging, kedelai, gula dan lainnya
5. Stabilisasi harga dan pasokan pangan
6. Peningkatan PPH dan pengurangan konsumsi beras
7. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
8. Peningkatan produksi pakan ternak
9. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan perkebunan yang masih luas sebagai hijauan pakan ternak dan integrasi ternak
10. Akselerasi arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dan teknologi produksi pangan dan peternakan
12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pangan dan peternakan
13. Koordinasi Dinas terkait melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan untuk peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur, jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar akses dan distribusi pangan dari dan ke masyarakat
14. Akselerasi penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pangan melalui media cetak dan elektronik
15. Peningkatan populasi dan produktifitas ternak
16. Peningkatan peran Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner khususnya penanganan produk peternakan
17. Peningkatan lembaga cadangan pangan masyarakat dalam rangka antisipasi terhadap bencana
18. Peningkatan status kesehatan hewan
19. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota membuat rumusan PERDA tentang lahan pangan berkelanjutan sehingga dapat menghambat alih fungsi lahan

20. Pembangunan fasilitas Rumah Sakit Hewan

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran diatas adalah :

1. …
2. …
3. …
4. Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak
5. Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
6. Meningkatkan produksi pakan ternak
7. Meningkatkan status kesehatan hewan
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan parasarana IB
9. Meningkatkan ketersedaan produk hewan yang ASUH
10. Meningkatkan kemampuan SDM peternakan
11. Memfasilitasi sarana dan prasarana peternak baik hulu maupun hilir
12. Memfasiitasi lembaga keuangan pemerintah dan swasta dengan kelompok-kelompok agribsnis peternakan

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Penyusunan program mengacu kepada Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional dan daerah. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Program yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 s/d 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran 2019 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sesuai lampiran.

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini merupakan Rancangan Rencana Terja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.